

RINGKASAN

Maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berjalan optimal, hal ini dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2024 yang berada pada skor 37 dari 100. Dalam rangka memperkuat tata kelola yang kelola organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, pemerintah mendorong pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed) merupakan fakultas pertama di Unsoed yang mengimplementasikan Zona Integritas sejak tahun 2021 dan telah menunjukkan capaian penilaian yang memenuhi standar minimal WBK. Namun demikian, hingga saat ini FISIP Unsoed belum berhasil memperoleh predikat WBK secara resmi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses dan dinamika implementasi Zona Integritas di FISIP Unsoed.

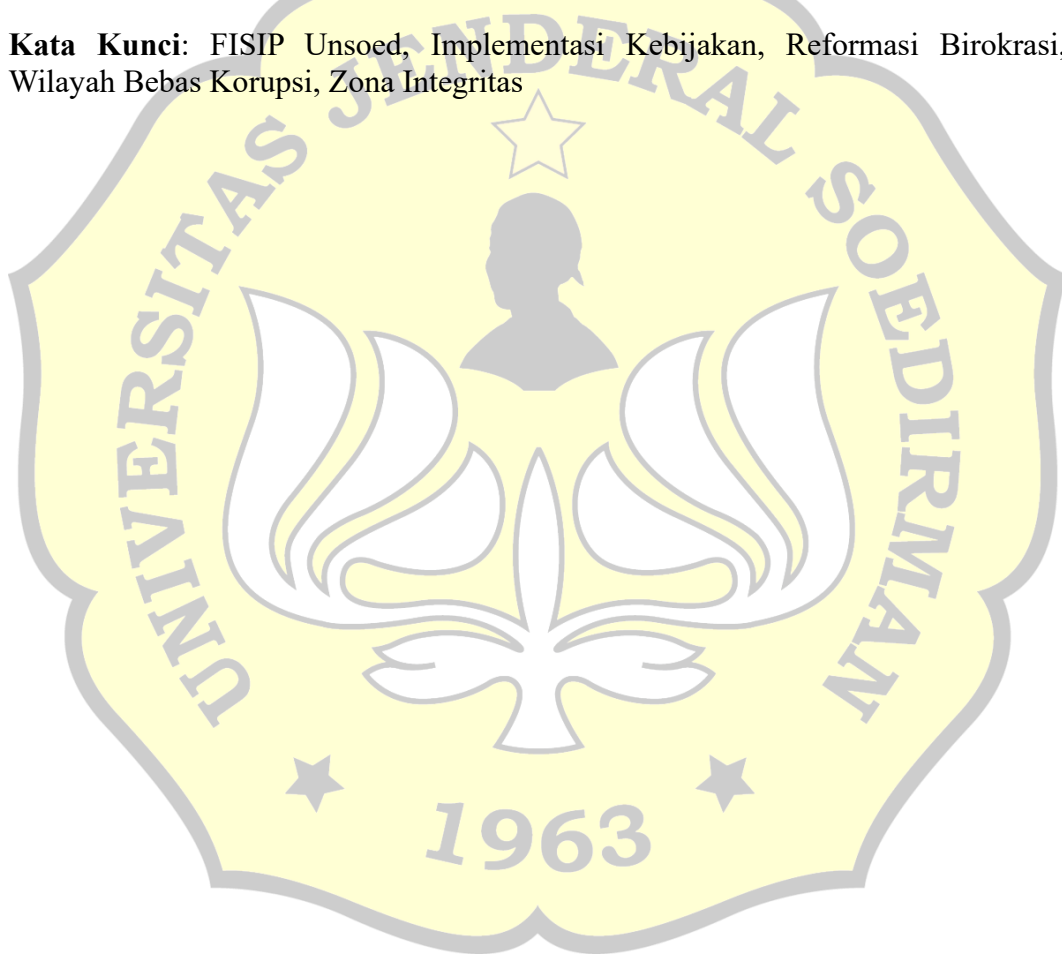
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Zona Integritas menuju WBK di FISIP Unsoed dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, yang menekankan pada aspek *Compliance* (kepatuhan) dan *What's Happening* (apa yang terjadi) guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kepatuhan implementor serta dinamika pelaksanaan kebijakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan penentuan informan melalui *purposive sampling* yang melibatkan ketua Zona Integritas, tim Zona Integritas, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode interaktif menurut Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas di FISIP Unsoed telah memberikan energi positif yang cukup berarti. Pada aspek *Compliance* (kepatuhan), perilaku implementor secara umum telah mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Zona Integritas, terutama dalam upaya pencegahan gratifikasi yang ditandai dengan penurunan praktik gratifikasi hingga sekitar 95% dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Namun, pemahaman terhadap prosedur, aturan, dan standar Zona Integritas belum merata, terutama pada tenaga kependidikan dan mahasiswa. Pada aspek *What's Happening* (apa yang terjadi), implementasi Zona Integritas melibatkan banyak aktor dengan tujuan yang relatif jelas serta menunjukkan perkembangan positif sejak dicanangkan. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan

anggaran, kompleksitas koordinasi antar aktor, serta rendahnya partisipasi mahasiswa.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Zona Integritas di FISIP Unsoed telah berjalan ke arah yang positif dan mencerminkan adanya perubahan dalam tata kelola dan budaya organisasi. Meskipun demikian, keberlanjutan implementasi kebijakan ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pemerataan pemahaman, konsistensi perilaku implementor, koordinasi antar aktor, serta dukungan sumber daya. Dengan penguatan tersebut, Zona Integritas di FISIP Unsoed diharapkan dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang berkelanjutan.

Kata Kunci: FISIP Unsoed, Implementasi Kebijakan, Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas Korupsi, Zona Integritas



SUMMARY

The persistent practice of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) in Indonesia indicates that efforts to eradicate corruption have not been running optimally, as evidenced by Indonesia's Corruption Perception Index score in 2024, which stands at 37 out of 100. To strengthen governance and manage clean, transparent, and accountable organizations, the government encourages the development of Integrity Zones (ZI) toward Corruption-Free Areas (WBK) as part of the bureaucratic reform agenda. The Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed), is the first faculty at Unsoed to implement the Integrity Zone since 2021 and has achieved assessment results that meet the minimum WBK standards. However, to date, FISIP Unsoed has not officially obtained the WBK title, raising questions about the process and dynamics of implementing the Integrity Zone at FISIP Unsoed.

This study aims to describe the implementation of the Integrity Zone towards WBK at FISIP Unsoed by using the theory of policy implementation by Ripley and Franklin, which emphasizes the aspects of Compliance and What's Happening to obtain a comprehensive picture of the compliance of implementers and the dynamics of policy implementation at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jenderal Soedirman. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach, selecting informants through purposive sampling, which includes the head of the Integrity Zone, the Integrity Zone team, lecturers, education staff, and students. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using interactive methods, as described by Miles and Huberman.

The results of the study show that the implementation of the Integrity Zone at FISIP Unsoed has generated significant positive momentum. In terms of compliance, the behavior of implementers, in general, has reflected a commitment to the values of the Integrity Zone, particularly efforts to prevent gratuities, as evidenced by a decrease in gratuity practices to around 95% and the implementation of service standard operating procedures (SOPs). However, understanding of the Integrity Zone's procedures, rules, and standards is not evenly distributed, especially among education staff and students. In the 'what's happening' aspect, the implementation of the Integrity Zone involves many actors with relatively clear goals and has shown positive developments since its launch. However, the program's implementation still faces challenges, including budget limitations, the complexity of coordinating among actors, and low student participation.

The conclusion of this study indicates that the implementation of the Integrity Zone at FISIP Unsoed has progressed in a positive direction, reflecting changes in governance and organizational culture. However, the sustainability of implementing this policy still requires strengthening, especially in terms of equitable understanding, consistency of implementer behavior, coordination between actors, and adequate resource support. With this strengthening, the Integrity Zone at FISIP Unsoed is expected to contribute more optimally to realizing a sustainable Corruption-Free Zone (WBK).

Keywords: FISIP Unsoed, Policy Implementation, Bureaucratic Reform, Corruption-Free Area, Integrity Zone

